

PENANGGULANGAN PERANG SAUDARA ANTARA ETNIS ARAB DENGAN ETNIS AFRIKA DI SUDAN

Vivi Elizabeth

Jurusan Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: vivieyizabeth@gmail.com

ABSTRACT

The definition of the state is abstract and changing. This can happen because this understanding exists from a different era and also because the thought pattern of the originator is not free from the reality of life around him. There are three types of state forms, namely the Unitary State, Federal State, and Confederate State. Looking at the types of countries, the author in this study will focus on one example of a Confederate State, namely Africa. One of the states of Africa is Sudan, where this state is divided into two groups, namely South Sudan and North Sudan. South Sudan and North Sudan often have civil wars because of the problems of Arab and African ethnicity. This study aims to analyze how to overcome the civil war between these two regions. In this study the author uses the Normative Research method which is a research method that uses library analysis or secondary data. The author also uses Primary and Secondary Law materials as a reference in this study. There are many causes of the civil war between South Sudan and North Sudan. Even though South Sudan has now established itself as a country, civil wars are still common.

Keywords: Ethnic, Civil War, South Sudan, North Sudan

ABSTRAK

Pengertian negara bersifat abstrak dan berubah-ubah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pengertian ini ada dari jaman yang berbeda dan juga karena pola pemikiran pencetusnya tidak terbebas dari kenyataan hidup disekitarnya. Jenis-jenis bentuk negara ada tiga yaitu Negara Kesatuan, Negara Federal, dan Negara Konfederasi. Melihat dari jenis-jenis negara, penulis dalam penelitian ini akan berfokus pada salah satu contoh dari Negara Konfederasi yaitu Afrika. Salah satu negara bagian dari Afrika adalah Sudan, dimana negara bagian ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu Sudan Selatan dan Sudan Utara. Sudan Selatan dan Sudan Utara sering sekali terjadi perang saudara karena permasalahan Etnis Arab dan Etnis Afrika. Penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana penanggulangan perang saudara antara kedua wilayah ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Normatif dimana merupakan metode penelitian yang menggunakan analisa kepustakaan atau data sekunder. Penulis juga menggunakan bahan Hukum Primer dan Sekunder sebagai referensi pada penelitian ini. Banyak sekali penyebab terjadinya Perang saudara antara Sudan Selatan dan Sudan Utara. Meskipun Sekarang Sudan Selatan sudah berdiri sebagai negara sendiri, perang saudara masih saja sering terjadi.

Kata Kunci : Etnis, Perang Saudara, Sudan Selatan, Sudan Utara

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konflik adalah kondisi adanya pertentangan atau ketidakcocokan antara beberapa pihak yaitu individu, kelompok, atau organisasi (Glasl 2002) dimana para pihak tersebut berusaha untuk saling menggagalkan tercapainya tujuan dari pihak lain (Folger, Poolle dan Stutman 1993) yang dapat berupa status, kekuasaan, ataupun sumber daya yang bersifat langka (Coser 1956). Menurut Global Peace Index (GPI) ada beberapa negara di kawasan Afrika tergolong dalam negara yang tidak aman dengan skor diatas 3, misalnya Somalia (3,368) dan Sudan Selatan (3,397). Konflik yang sudah berlangsung sejak lama terus berlangsung hingga akhirnya Sudan Selatan merdeka dari Sudan lewat referendum pemisahan diri tahun 2011. Namun, setelah Sudan Selatan merdeka dari Sudan, konflik masih terus berlanjut di antara kedua negara. *Sudan People's Liberation Army (SPLA)* menyebrang ke Sudan dan militer Sudan mengebom desa – desa di perbatasan bahkan konflik antara Sudan dan Sudan Selatan mengarah ke perang antara kedua negara (Ottaway dan El-Sadany 2012).

Rumusan Masalah

Bagaimana cara pihak sekutu dapat melakukan mediasi agar perang tersebut tidak terjadi kembali?

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian Normatif. Yang dimana makna dari penelitian Normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisa data kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian Normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal. Dalam penelitian ini penulis mengacu pada peraturan atau konferensi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis. Putusan Pengadilan Internasional, dan pendapat para ahli (doktrin). dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan peundang-undangan, Yurisprudensi, Traktat dan lain-lain. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai hukum primer, contohnya adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan, pengertian negara bersifat abstrak dan berubah-ubah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pengertian ini ada dari jaman yang berbeda dan juga karena pola pemikiran pencetusnya tidak terbebas dari kenyataan hidup disekitarnya. Kenyataan hidup tersebut bisa dari agama, aliran, atau pemahaman yang memperngaruhi cara pandang manusia terhadap pandangan hidupnya. Dari pandangan-pandangan inilah muncul pengertian negara. Seorang ahli pikir dari jaman Yunani Kuno pada tahun 384-322 sebelum Masehi bernama Aristoteles memberi rumusan arti negara, dimana pada intinya rumusan tersebut rumusan pengertian negara menurut Aristoteles masih terikat dengan wilayah yang kecilyang disebut dengan *Polis* (sekarang di sebut dengan negara). rumusannya adalah negara merupakan negara

hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga yang ikut serta dalam pemusyawaratan negara (*ecclesia*).

Bentuk dari negara terdapat 3 macam yaitu:

1. Negara Kesatuan

Disebut sebagai negara kesatuan karena kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak setra dan tidak sama. Pemerintah Pusat berperan sebagai kekuasaan yang menonjol dari suatu negara dan tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan pemerintah daerah tidak terdapat badan legislatif karena bersifat *derivatif* (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonom yang luas. Terdapat 2 ciri yang melekat dengan suatu negara kesatuan yaitu :

1. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan belimpahnya kewenangan dari pemerintah pusat, atau Kepala Wilayah, Kepala Instansi, dan memiliki sifat tingkatan vertikal dari atasan kepada pejabat-pejabat di daerah.

2. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan menyerahkan urusan pemerintahan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang berada di atasnya pada daerah menjadi urusan pemerintahan daerah yang berurusan.

2. Negara Federal

Negara federal adalah Negara yang pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah seimbang, dimana masing-masing bagian dari negara tersebut bebas dari campur tangan dari pemerintahan pusat. Hanya saja untuk kekuasaan tertentu pemerintah pusat mempunyai kelebihan yaitu di bidang pertahanan urusan luar negeri, menentukan mata uang, pos dan lain sebagainya. Tiap negara bagian menjejaskan secara rinci kekuasaan pemerintah pusat, untuk hal lainnya adalah kekuasaan pemerintah negara bagian. Dalam persoalan lembaga yang berwenang menyelesaikan persengketaan yang timbul antara pemerintah pusat dengan daerah, pada setiap negara bagian/ pemerintah daerah di negara bagian tersebut telah menjelaskan secara rinci dari kekuasaan pemerintah daerah/ negara bagian, dan “sisa” kewenangannya berada pemerintah pusat.

3. Negara Konfederasi

Negara Konfederasi atau Serikat Negara-negara adalah negara yang dibentuk dari perserikatan negara-negara yang bersangkutan. Perbedaan antara Serikat Negara-negara dengan Negara Serikat adalah ukuran terikatnya kawula negara yang berserikat secara langsung langsung dengan peraturan dari negara tersebut. Di serikat negara-negara dalam alat perlengkapan negaranya memiliki kekuasaan dan kewajiban terhadap negara yang berserikat telah diatur itu tetapi tidak di terhadap warga negaranya. Lain halnya dengan Negara Serikat dimana alat-alat perlengkapan pusat negara mempunyai kekuasaan dan kewajiban secara langsung terhadap warga negaranya. Hal ini dikarenakan lemahnya sistem serikat dari serikat negara-negara.

Berdasarkan pendapat dari L. Oppenheim, beliau memberi penjelasan mengenai konfederasi yang pada intinya adalah negara konfederasi merupakan negara yang terdiri dari negara-negara yang memiliki kedaulatan penuh guna mempertahankan kemerdekaannya secara internal maupun eksternal dimana mereka berdatu dengan dasar perjanjian

internasional yang diakui dengan cara dibuatnya alat-alat perlengkapan secara tersendiri yang memiliki kekuasaan tertentu terhadap negara anggota Konfederasi tetapi tidak kepada rakyat dari negara yang menyelenggarakan Konfederasi tersebut.

Salah satu contoh dari negara Konfederasi adalah Negara Afrika. Dimana penulis pada artikel ini mendalami salah satu permasalahan yang ada di Negara Afrika sana, yaitu Perang Saudara antara Sudan Selatan dengan Sudan Utara.

Kronologi Perang Sudan Selatan dengan Sudan Utara

Perang saudara yang terjadi di Sudan terdiri dari beberapa sebab yaitu kolonialisme secara internal, perpecahan di selatan, dan minyak. Berikut adalah penjelasannya

1. Kolonialisme Secara Internal

Khartoum merupakan ibu kota di Sudan yang terletak di antara pertemuan Sungai Nil Putih dengan Sungai Nil Biru. Dari sini sungai nil mengalir menuju mesir, tetapi dilihat dalam sejarah, dikarenakan oleh kekuasaan dan kultur telah mengalir pada arah yang berlawanan. Pedalaman Sudan merupakan sebuah wilayah paralel menuju peradapan di Mesir dan mediterania dari Asia. Bagian selatan dari Sudan yang sekarang disebut dengan Sudan Selatan merupakan wilayah pinggiran tambahan pada daerah Sudan Utara. Hubungan yang Eksploitatif diantara pertengahan dan tepian sudah secara bertahap tumbuh sejak abad ke 16. ketika para warga di daerah utara mulai mengidentifikasi mereka sendiri dimana mereka merupakan muslim dan arab.

Penaklukan daerah yang dilakukan oleh Mesir pada tahun 1821 menimbulkan pembelahan antara Sudan Utara dan Sudan Selatan. Mesir melakukan rezim paksa pada masyarakat wilayah Sudan Utara untuk melakukan serangan pada masyarakat Sudan Selatan untuk menjarah dan memperbudak dengan menggunakan pajak pasaan yang tinggi di Sudan.

Pada tahun 1883 sampai dengan tahun 1885, nasionalis keagamaan Mahdiyyah secara sementara memulihkana kedaulatan Sudan, tetapi mereka tidak dapat untuk memerintah di wilayah Sudan Selatan dan enggan untuk mencakup orang-orang yang tidak percaya pada kepercayaan Mahdiyyah. Pada tahun 1899, Pasukan Anglo Mesir mengambil alih kontrol di Sudan dan Inggris menetapkan garis perbatasan negara pada tahun 1903 termasuk wilayah Sudan Selatan. Tetapi mereka tetap mengambil tindakan paksa di wilayah Selatan tanpa membangun administrasi pada pemerintahan dan pembangunan yang tepat. Selama di periode ini, wilayah Selatan tertinggal sangat jauh secara ekonomi, pendidikan, dan pembangunan.

Sudan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1956, tetapi struktur kolonial diantara Sudan Utara dan Sudan Selatan Tetapi berlangsung, sembari Inggris dan Mesir bersaing untuk mendapatkan kembali pengaruh kekuasaan mereka di Sudan dengan bernegosiasi dengan Nasionalis dari Sudan Utara. Suara dari Sudan Selatan diabaikan, bahkan ketika pemberontakan di Aquatoria berlangsung pada tahun 1955. Inggris menolak untuk menegaskan kembali otoritasnya di Sudan Selatan untuk mencegah Mesir untuk ikut campur dalam permasalahan. Sekarang hanya Sudan Utara yang mempunyai kekuatan tunggal untuk memilih masa depan dari kemerdekaan Sudan Selatan. Dari sini lah pola-pola kekejaman mulai terukir. Sembari pemerintahan Sudan Utara melakukan tujuannya untuk mendirikan negara Islam dan memelihara dominasi pada Sudan Selatan. Masyarakat Sudan Selatan Ingin berdiri sendiri. Pemerintah mengabaikan aspirasi masyarakat Sudan Selatan dengan mematahkan prosedur demokratis dan menekan mereka secara kejam. Lalu beberapa kelompok-kelompok pemberontak

mulai meningkat secara diam-diam atau dilakukan pengasingan ketika peperangan terus berlanjut yang berpusat di Sudan Selatan. Masyarakat Sudan Selatan terpaksa menderita karena kekerasan dan pengasingan.

Perang pertama terjadi pada tahun 1955 dimana merupakan konfrontasi antara pemerintahan Sudan dan Kelompok Gorilla Selatan yang memiliki Nama singkatan Anya-nya yang berarti racun ular. Pada tahun 1972, The Addis Ababa Agreement mengakhiri peperangan. Tetapi itu tidak dapat menyelesaikan masalah kolonialisme internal, hanya berhasil mendirikan pemerintah regional Sudan Selatan tanpa otoritas untuk mengatur atau untuk menginisiatif secara perkembangan ekonomi di bawah pemerintahan presiden Gaafar Nemeiri, terjadi pemberontakan kembali dan otonomi di Sudan Selatan telah dihapuskan.

Pada tahun 1953 aplikasi paksaan dari Hukum Syariat Islam pada Sudan Selatan mencetuskan perang kedua. Kali ini kelompok-kelompok pemberontak Sudan Selatan telah mengorganisasi diri mereka sendiri lebih baik lagi melalui SPLA (The Sudan People's Liberation Army) John Garang. Kelompok petugas militer mengusir Presiden Gaafar Nemeiri pada tahun 1955 dan Sadiq al-Mahdi (Prime Minister of Sudan) membuat sebuah bentrokan pemerintahan di Sudan. Sadiq al-Mahdi dan John Garang melakukan pertemuan untuk merencanakan perdamaian pada tahun 1989. Tetapi kelompok Omar al-bashir membatalkan hal tersebut. Pada saat perang kedua, konflik tersebut menyebar hingga daerah terpencil lainnya seperti Gunung Nuba, Sungai Nil Biru, dan Dafur.

Dibawah surat upacara komunitas internasional tanggal 11 September menjunjung tinggi; dari proses perdamaian. Pemerintahan Sudan dan para pemberontak akhirnya mencapai perjanjian perdamaian yang komprehensif pada tahun 2005. setelah setengah abad kesulitan akhirnya Sudan Selatan memiliki kesempatan untuk mengatasi struktur kolonialisasi internal. Referendum pada tahun 2011 masyarakat tertentu Sudan Selatan secara skala besar menyuarakan untuk berdiri sebagai negara sendiri.

2. Perpecahan Di Sudan Selatan

Menurut pemerintahan pusat, hanya terdapat dua situasi yang akan membawa mereka pada meja negosiasi untuk perdamaian. Ketika paksaan masyarakat Sudan Selatan sudah cukup kuat atau komunitas Internasional menaruh tekanan yang besar pada Sudan. Menurut sejarah, Sudan Selatan tidak pernah membuat perwujudan dalam politik, kepercayaan, atau etnis. Hanya terdapat orang-orang dengan identitas dan ketertarikan yang berbeda yang tinggal berserakan di sekeliling wilayah tersebut. Dengan tidak adanya perwujudan sosial, mereka rapuh dan tidak efektif saat peperangan. Satu contohnya adalah adanya perpisahan dalam SPLA. Pada tahun 1991, Rick Mcchar memimpin kelompok dari golongan yang Nuer dalam SPLA, lalu John Garang SPLA harus bertarung dengan 2 lawan.

3. Minyak

Ekplorasi petroleum mulai dilakukan pada sekitar tahun 1970. pipa minyak telah didirikan di wilayah Sudan Utara dimana memperluas hingga 1.600.000 kilometer yang menuju laut merah. Ketika Sudan mengekspor minyak mentah untuk pertama kalinya pada tahun 1999, pemerintah mendapatkan 2.2 miliar dollar dalam satu kali ekspor. Permasalahannya adalah lahan minyak berada di wilayah perbatasan utara selatan, dimana masyarakat Sudan Selatan tinggal. Pemerintah secara brutal memindahkan penduduk dengan mensenjatakan kelompok lokal seperti Baggara, dan breakaway Nuer Faction dari SPLA untuk mengambil alih kekuasaan dari lahan

minyak. Pertengkaran antara pemerintah dan pemberontak berlanjut. Kemudian beberapa fraksi yang mendukung pemerintah menantang kontrol minyak milik wilayah mereka sendiri dan akhirnya bergabung kembali dengan SPLA. Berdasarkan The Comprehensive Peace Agreement (CPA), Sudan Selatan memiliki otonomi selama 6 tahun dan referendum kemerdekaan mengambil alih pada Januari 2011. pada bulan Juli di tahun yang sama Sudan Selatan menjadi negara Republik Sudan Selatan. Sudan Utara dan Sudan Selatan setuju untuk berbagi hasil dari lahan minyak dengan sama rata. Tetapi dengan sayangnya, setelah begitu banyak kesulitan untuk kedamaian Sudan Selatan gagal untuk melewati pemersatuan ini. Dan perang saudara terjadi lagi pada tahun 2013.

Penanggulangan Perang Saudara antara Sudan Selatan dengan Sudan Utara

Sudan Selatan berusaha untuk memerdekakan nnegaranya melalui referendum pemisahan. Referendum pemisahan ini dilakukan untuk menentukan nasib Sudan wilayah selatan apakah tetap masuk dalam 872 negara Sudan atau membangun negara sendiri. Menurut *Referendum Act, internally displaced persons* berhak menjadi voter dan ada tiga kategori yang berhak menjadi voter, yaitu yang lahir dari paling tidak satu orang tua penduduk asli Sudan bagian selatan yang tinggal di Sudan bagian selatan/sebelum 1 Januari 1956 yang leluhurnya ega ditemukan pada etnis Sudan bagian selatan tanpa paling tidak satu orang tuanya penduduk asli Sudan bagian selatan/ sebelum 1 Januari 1956; dan yang penduduk tetap Sudan bagian selatan sejak 1 Januari 1956. Hasil dari referendum diumumkan secara resmi pada 7 Februari 2011 dengan hasil 97,58% dari 3.947.676 voter menginginkan Sudan bagian selatan merdeka dari Sudan (*European Union Election Observation Mission 2011*). Sudan Selatan resmi menjadi negara baru pada 9 Juli 2011 dengan nama resmi Republic of South Sudan, tepat 6 tahun setelah berlakunya CPA.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ada dua etnis terbesar di Sudan, etnis Arab dan etnis Afrika. Jumlah etnis Afrika lebih banyak dari etnis Arab, namun etnis Arab lebih mendominasi pemerintahan sehingga kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung memihak etnis Arab. Seperti misalnya pembagian wilayah, etnis Arab bermukim didaerah utara yang lebih subur. Pendapatan dari minyak pun yang kebanyakan berasal dari wilayah selatan lebih banyak digunakan untuk membangun wilayah utara. Oleh karena perlakuan tidak adil inilah muncul perang saudara di Sudan.

Perang saudara yang pertama terjadi adalah saat suku Anya-nya di Sudan bagian selatan yang mayoritas etnis Afrika penganut Kristen dan animisme melawan pemerintah Sudan pada tahun 1956 yang berakhir saat ditandatanganinya *Addis Ababa Agreement* pada 1972 yang menghasilkan daerah otonomi khusus di Sudan bagian selatan. Kelompok pemberontak kembali muncul di Darfur dengan nama *Sudan People's Liberation Movement/Army* (SPLM/A) dan *Justice and Equality Movement* (JEM). Kelompok ini menginginkan sumber daya dan perlakuan yang adil dari pemerintah. Pemerintah Sudan membuat pasukan tandingan untuk menandingi SPLM/A dan JEM. Pasukan ini bernama Janjaweed yang terdiri atas suku nomaden Arab Rizeigat, Misseriya dan Abbala yang dijanjikan tanah oleh pemerintah Sudan.

Saran

Untuk menghentikan konflik antara kelompok pemberontak dan Janjaweed Presiden Chad, Idriss Déby menjadi mediator antara kedua pihak dalam perundingan gencatan senjata 45 hari pada 2003, namun perjanjian ini gagal. Uni Afrika atas permintaan SPLM/A menjadi mediator dalam perundingan kembali tahun 2004 untuk membahasa gencatan senjata dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Darfur. Kedua pihak juga menandatangani Darfur Peace Agreement pada 2006, namun hanya SPLM/A MM2 yang menandatangani perjanjian tersebut. SPLM/A AW3 tidak mau menandatangani Darfur Peace Agreement karena pembagian kekuasaan dan kompensasi yang dijanjikan tidak sesuai yang mereka minta. Konflik yang sudah berlangsung sejak lama terus berlangsung hingga akhirnya Sudan Selatan merdeka dari Sudan lewat referendum pemisahan diri tahun 2011. Namun, setelah Sudan Selatan merdeka dari Sudan, konflik masih terus berlanjut di antara kedua negara. *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) menyebrang ke Sudan dan militer Sudan mengebom desa – desa di perbatasan. Bahkan, konflik antara Sudan dan Sudan Selatan mengarah ke perang antara kedua negara (Ottaway dan El-Sadany 2012). Maka timbullah pertanyaan, mengapa masih terjadi konflik antara Sudan dan Sudan Selatan setelah adanya referendum pemisahan diri Sudan Selatan dari Sudan? Penelitian ini menggunakan teori segitiga konflik milik Johan Galtung, dan dinamika konflik milik Peter Wallensteen untuk menjawab pertanyaan diatas.

REFERENSI

- Kusnardi, Moh, Saragih, Bintar. *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995.
- Aninomos, “[Root Causes] Sudan’s Civil Wars Explained”, Africa Chronicle, terunggah pada 29 September 2021, Youtube Video, www.youtube.com/watch?v=nMhYQgkbp8&feature=youtu.be .
- BBC. 2011. Africa : Sudan 'stealing oil' from South - Pagan Amum. 1 Desember. Diakses November 6, 2021. <http://www.bbc.com/news/world-africa-15983251>.
- Collins, Robert O. 2006. “Disaster in Darfur : Historical Overview.” Dalam Genocide In Darfur, oleh Samuel Totten dan Eric Markusen, 3-24. New York: Routledge.
- Check, Nicasius Achu, dan Thabani Mdlongwa. 2012. “*The Heglig Oil Conflict: Exercise of Sovereignty or an Act of Aggression?*” Policy Brief 1-6

(halaman kosong)